

# JURNAL

## AKUNTANSI & KEUANGAN

Volume 12, No. 2, September 2021

ISSN: 2087-2054

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi CSR Pada Perusahaan Barang Konsumsi  
**Ike Nurul Anggraini, Listyorini Wahyu Widati**

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Dividen Pada Perusahaan LQ45  
**Puji Lestari, Endang Masitoh, Purnama Siddi**

Pengelolaan Keuangan Keluarga Etnis Mbojo  
**Khofifa Tussilmi dan Puji Endah Purnamasari**

Optimalisasi Akad Rahn Tasjily Dalam Pembiayaan UMKM Studi Pada Toko Kelontongan Di Bandar Lampung  
**Maria Septijantini Alie dan Amelia Anwar**

Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, Struktur Aktiva dan Pajak Terhadap Struktur Modal  
**Ferlina Ekinanda, Anita Wijayanti, Purnama Siddi**

Faktor-Faktor Keuangan Yang Memengaruhi Manajemn Laba  
**Anita Wijaya Ningsih, Rieka Ramadhaniyah, Nolita Yeni Siregar, Reva Meiliana, Dedi Putra**

Kualitas LKPD: Peran Pengungkapan, SPI dan Kepatuhan pada Undang-Undang  
**Khairudin, Aminah, Luke Suciwati Amna, Syamsu Rizal, Frandio Gustian**

Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas dan Leverage Terhadap *Financial Distress*  
**Luke Suciwati Amna, Aminah, Khairudin, Herry Goenawan Soedarsa, Hapis Kiki Pribadi**

Determinasi *Financial Distress* Pada Perusahaan *Property* dan *Real Estate*  
**Nurdiawansyah, Yanuarius Yanu Dharmawan, Haninun, Tri Lestira Putri Warganegara, Sinthya Santoso**

Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Return Saham Perusahaan Manufaktur  
**Indrayenti, Luke Suciwati Amna, Lydia Maharani**

# JURNAL

## AKUNTANSI & KEUANGAN

Volume 12, No. 2, September 2021

ISSN: 2087-2054

### **Dewan Pembina**

Prof. Dr. Ir. M. Yusuf S. Barusman, M.B.A  
Prof. Dr. Iskandar Ali Alam S.E., M.M.

### **Editor in Chief**

Aminah, S.E., M.S.Ak.

### **Managing Editor**

Luke Suciwati Amna, S.E., M.S.Ak.

### **Editor**

Khairudin S.E., M.S.Ak.  
Nurdiawansyah, S.E., M.S.Ak.

### **Penyuting Ahli (Mitra Bestari)**

Dr. Tina Miniawati, S.E., M.B.A. (Universitas Trisakti)  
Dr. Khomsiyah, S.E., M.M. (Universitas Trisakti)  
Dr. Lindrianasari, S.E., M.Si.Akt., C.A. (Universitas Lampung)  
Sujoko Efferin, Mcom (Hons), MA(Econ), Ph.D. (Universitas Surabaya)

### **Penerbit**

Universitas Bandar Lampung  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi  
SENARAI-Jurnal Akuntansi & Keuangan Terbit 2 kali setahun pada bulan Maret &  
September

Artikel yang dimuat berupa hasil riset Empiris dan telah teoritis konseptual yang kritis dalam kajian bidang akuntansi, auditing, perpajakan, dan keuangan.

### **Alamat Redaksi**

Gedung F- Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Bandar Lampung  
Kampus A Jalan Z.A Pagar Alam No. 26 Labuan Ratu Bandar Lampung 35142  
Telp: (0721) 701979, Fax: (0721) 701467, Email: *Prodi.akuntansi@ubl.ac.id*

# JURNAL

## AKUNTANSI & KEUANGAN

Volume 12, No. 2, September 2021

ISSN: 2087-2054

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi CSR Pada Perusahaan Barang Konsumsi  
**Ike Nurul Anggraini, Listyorini Wahyu Widati**

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Dividen Pada Perusahaan LQ45  
**Puji Lestari, Endang Masitoh, Purnama Siddi**

Pengelolaan Keuangan Keluarga Etnis Mbojo  
**Khofifa Tussilmi dan Puji Endah Purnamasari**

Optimalisasi Akad Rahn Tasjily Dalam Pembiayaan UMKM Studi Pada Toko Kelontongan Di Bandar Lampung  
**Maria Septijantini Alie dan Amelia Anwar**

Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, Struktur Aktiva dan Pajak Terhadap Struktur Modal  
**Ferlina Ekinanda, Anita Wijayanti, Purnama Siddi**

Kualitas LKPD:Peran Pengungkapan, SPI dan Kepatuhan Pada Undang-Undang  
**Khairudin, Aminah, Luke Suciyati Amna, Frandio Gustian**

Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas dan Leverage Terhadap *Financial Distress*  
**Luke Suciyati Amna, Aminah, Khairudin, Indrayeti, Hapis Kiki Pribadi**

Faktor-Faktor Keuangan Yang Memengaruhi Manajemn Laba  
**Anita Wijaya Ningsih, Rieka Ramadhaniyah, Nolita Yeni Siregar, Reva Meiliana, Dedi Putra**

Kualitas LKPD:Peran Pengungkapan, SPI dan Kepatuhan Pada Undang-Undang  
**Khairudin, Aminah, Luke Suciyati Amna, Syamsu Rizal, Frandio Gustian**

Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas dan Leverage Terhadap *Financial Distress*  
**Luke Suciyati Amna, Aminah, Khairudin, Herry Goenawan Soedarsa, Hapis Kiki Pribadi**

Determinasi *Financial Distress* Pada Perusahaan *Property* dan *Real Estate*  
**Nurdiawansyah, Yanuarius Yanu Dharmawan, Haninun, Tri Lestira Putri Warganegara, Sinthya Santoso**

Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Return Saham Perusahaan Manufaktur  
**Indrayenti, Luke Suciyati Amna, Lydia Maharani**

# JURNAL

## AKUNTANSI & KEUANGAN

Volume 12, No. 2, September 2021

ISSN: 2087-2054

### Daftar Isi

	<b>Halaman</b>
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Csr Pada Perusahaan Barang Konsumsi <b>Ike Nurul Anggraini, Listyorini Wahyu Widati</b>	1-13
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Dividen Pada Perusahaan LQ45 <b>Puji Lestari, Endang Masitoh, Purnama Siddi</b>	14-30
Pengelolaan Keuangan Keluarga Etnis Mbojo <b>Khofifa Tussilmi dan Puji Endah Purnamasari</b>	31-38
Optimalisasi Akad Rahn Tasjily Dalam Pembiayaan UMKM Studi Pada Toko Kelontongan Di Bandar Lampung <b>Maria Septijantini Alie dan Amelia Anwar</b>	39-44
Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, Struktur Aktiva dan Pajak Terhadap Struktur Modal <b>Ferlina Ekinanda, Anita Wijayanti, Purnama Siddi</b>	45-62
Faktor-Faktor Keuangan Yang Memengaruhi Manajemn Laba <b>Anita Wijaya Ningsih, Rieka Ramadhaniyah, Nolita Yeni Siregar, Reva Meiliana, Dedi Putra</b>	63-76
Kualitas LKPD:Peran Pengungkapan, SPI dan Kepatuhan pada Undang-Undang <b>Khairudin, Aminah, Luke Suciyati Amna, Syamsu Rizal, Frandio Gustian</b>	77-87
Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas dan Leverage Terhadap <i>Financial Distress</i> <b>Luke Suciyati Amna, Aminah, Khairudin, Herry Goenawan Soedarsa, Hapis Kiki Pribadi</b>	88-99

# JURNAL

---

# AKUNTANSI & KEUANGAN

---

Volume 12, No. 2, September 2021

ISSN: 2087-2054

## Daftar Isi

## Halaman

Determinasi <i>Financial Distress</i> Pada Perusahaan <i>Property</i> dan <i>Real Estate</i> <b>Nurdiawansyah, Yanuarius Yanu Dharmawan, Haninun, Tri Lestira</b> <b>Putri Warganegara, Sinthya Santoso</b>	100-111
Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Return Saham Perusahaan Manufaktur <b>Indrayenti, Luke Suciyati Amna, Lydia Maharani</b>	112-122

# JURNAL

---

# AKUNTANSI & KEUANGAN

---

Volume 12, No. 2, September 2021

ISSN: 2087-2054

## Informasi Kebijakan dan Selingkung Berkala

### I. Kebijakan editorial

**JURNAL** Akuntansi & Keuangan adalah sebuah berkala yang dipublikasikan oleh Universitas Bandar Lampung, yang bertujuan untuk menjadi wadah kreatifitas para akademisi, profesional, peneliti, dan mahasiswa di bidang Akuntansi dan Keuangan termasuk juga bidang Auditing, Sistem Informasi Akuntansi, Tata kelola Perusahaan, Perpajakan, Akuntansi Internasional, Akuntansi Managemen, Akuntansi Keperilakuaan, Pasar Modal dan lain sebagainya. Topik yang semakin meluas di bidang kajian riset Akuntansi diakomodir publikasinya di dalam berkala ini.

Paper yang akan dipublikasikan di dalam berkala **JURNAL** Akuntansi & Keuangan harus ditulis di dalam bahasa Indonesia yang baik dan sesuai dengan EYD. Semua instrumen yang digunakan untuk memperoleh data penelitian harus dimasukkan di dalam lampiran paper penelitian, paling tidak, penulis bersedia memberikan klarifikasi atas instrumen yang digunakan saat ada permintaan dari peneliti lainnya.

### Sekretariat Editor Berkala

Gedung F - Fakultas Ekonomi Universitas Bandar Lampung  
Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi  
Kampus A Jalan Z.A. Pagar Alam No. 26 Labuhan Ratu Bandar Lampung 35142  
Telp.: (0721) 701979, Fax.: (0721) 701467, Email:

### II. Petunjuk penulisan

Artikel yang dikirim ke **JURNAL** Akuntansi & Keuangan harus mengikuti petunjuk seperti berikut:

1. Naskah merupakan naskah asli yang belum pernah diterbitkan atau sedang dilakukan penilaian pada berkala lain. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia dengan jarak 1 spasi, sepanjang 20-30 halaman kertas A4 dengan tipe huruf Times New Roman.. Naskah dikirim atau diserahkan ke sekretariat **JURNAL** Akuntansi & Keuangan rangkap satu disertai disket berikut dengan biodata penulis dan alamat lengkap (kantor dan rumah) pada lembaran yang terpisah dari halaman pertama artikel.
2. Judul naskah dapat ditulis dengan menggambarkan isi pokok tulisan, dan atau ditulis secara ringkas, jelas, dan menarik.
3. Nama Penulis disertai catatan kaki tentang profesi dan lembaga tempat penulis bekerja dalam naskah yang telah diterima untuk diterbitkan.
4. Abstrak ketik satu spasi, tidak lebih dari 250 kata dalam bahasa Inggris. Abstrak memuat tujuan penelitian, isu, permasalahan, sampel dan metode penelitian, serta hasil dan simpulan (jika memungkinkan).

5. Pendahuluan berisikan uraian tentang latar belakang masalah, ruang lingkup penelitian, dan telaah pustaka yang terkait dengan permasalahan yang dikaji, serta rumusan hipotesis (jika ada). Uraian pendahuluan maksimum 10% total halaman.
6. Untuk penelitian kuantitatif,
  - a. Telaah Literatur dan Pengembangan Hipotesis memuat paling tidak satu buah teori yang menjadi dasar pemikiran penelitian. Hipotesis dikembangkan menggunakan asumsi dasar teori dan hasil penelitian sebelumnya. Telah literatur maksimum 40 % total halaman.
  - b. Metodologi Penelitian meliputi uraian yang rinci tentang bahan yang digunakan, metoda yang dipilih, teknik, dan cakupan penelitian. Uraian bahan dan metoda maksimum 20 % total halaman.
7. Untuk penelitian kualitatif menyesuaikan dengan metodologi kualitatif.
8. Hasil dan Pembahasan merupakan uraian obyektif dari-hasil penelitian dan pembahasan dilakukan untuk memperkaya makna hasil penelitian. Uraian hasil dan pembahasan minimum 25 % total halaman.
9. Simpulan yang merupakan rumusan dari hasil-hasil penelitian. Harus ada sajian dalam satu kalimat inti yang menjadi simpulan utama. Simpulan maksimum 10% dari keseluruhan lembar artikel.
10. Referensi (Daftar Pustaka) ditulis berurutan berdasarkan alphabetical, disusun menggunakan suku kata terakhir dari nama penulisnya, atau institusi jika dikeluarkan oleh organisasi.
  - a. Buku: nama penulis, tahun penerbitan, judul lengkap buku, penyunting (jika ada), nama penerbit, dan kota penerbitan.
  - b. Artikel dalam buku: nama penulis, tahun penerbitan, judul artikel/tulisan, judul buku, nama penyunting, kota penerbitan, nama penerbit, dan halaman.
  - c. Terbitan berkala: nama penulis, tahun penerbitan, judul tulisan, judul terbitan (bila disingkat, sebaiknya menggunakan singkatan yang baku), volume, nomor, dan halaman.
  - d. Artikel dalam internet: nama penulis, judul, dan situsnya.
  - e. Tabel diberi nomor dan judul dilengkapi dengan sumber data yang ditulis dibawah badan tabel, diikuti tempat dan waktu pengambilan data.
  - f. Ilustrasi dapat berupa gambar, grafik, diagram, peta, dan foto diberi nomor dan judul.
11. Setiap referensi yang digunakan di dalam naskah artikel menggunakan petunjuk yang dirujuk pada The Indonesian Journal of Accounting Research, sebagai berikut:
  - A. Kutipan dalam tubuh naskah paper harus disesuaikan dengan contoh berikut:
    - I. Satu sumber kutipan dengan satu penulis (Brownell, 1981).
    - II. Satu sumber kutipan dengan dua penulis (Frucot dan Shearon, 1991).
    - III. Satu sumber kutipan dengan lebih dari satu penulis (Hotstede et al., 1990).
    - IV. Dua sumber kutipan dengan penulis yang berbeda (Dunk, 1990; Mia, 1988).
    - V. Dua sumber kutipan dengan satu penulis (Brownell, 1981, 1983).
    - VI. Dua sumber kutipan dengan satu penulis diterbitkan pada tahun yang sama (Brownell, 1982a, 1982b).
    - VII. Sumber kutipan dari lembaga harus dinyatakan dengan menggunakan akronim institusi (FASB, 1994)
  - B. Setiap artikel harus menulis referensi menggunakan panduan berikut:
    - I. Referensi harus tercantum dalam urutan abjad dari nama belakang penulis atau nama lembaga.

- II. Referensi harus dinyatakan dengan urutan sebagai berikut: penulis (s) nama, tahun publikasi, judul kertas atau buku teks, nama jurnal atau penerbit dan nomor halaman. Contoh:
- a) Amerika Akuntansi Association, Komite Konsep dan Standar Laporan Keuangan Eksternal. 1977. Pernyataan tentang Teori Akuntansi dan Teori Penerimaan. Sarasota, FL: AAA.
  - b) Demski, J. S., dan D. E. M. Sappington. 1989. Struktur hirarkis dan akuntansi pertanggungjawaban, *Jurnal Akuntansi Penelitian* 27 (Spring): 40-58.
  - c) Dye, R. B., dan R. Magee. 1989. Biaya Kontijensi untuk perusahaan audit. Kertas kerja, Northwestern University, Evanston, IL.
  - d) Indriantoro, N. 1993. Pengaruh Penganggaran Partisipatif Terhadap Prestasi Kerja dan Kepuasan Kerja dengan Locus of Control dan Dimensi Budaya sebagai Moderating Variabel. Ph.D. Disertasi. University of Kentucky, Lexington.
  - e) Naim, A. 1997. Analisis Penggunaan Akuntansi Biaya Produk Dalam Keputusan Harga oligopolistik. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia* 12 (3): 43-50.
  - f) Porcano, T. M. 1984a. Keadilan distributif dan Kebijakan Pajak. *Akuntansi Ulasan* 59 (4): 619-636.
  - g) ----- . 1984b. Pengaruh Persepsi Kebijakan Pajak Niat Investasi Perusahaan. *The Journal of American Association Perpajakan* 6 (Fall): 7-19.
  - h) Pyndyk, R. S. dan D. L. Rubinfeld. 1987. Model ekonometrik & Forecasts Ekonomi, 3rd ed. NY: McGraw-Hill Publishing, Inc.
12. Author(s) harus melampirkan CV, alamat email, alamat korespondensi dan pernyataan yang menyatakan pasal tersebut tidak sedang disampaikan kepada atau diterbitkan oleh jurnal lain dalam email tersebut dan /atau pos.



## **Kualitas LKPD:Peran Pengungkapan, SPI dan Kepatuhan pada Undang-Undang**

**Khairudin<sup>1</sup>,  
Aminah<sup>2</sup>,  
Luke Suciyati Amna<sup>3</sup>,  
Syamsu Rizal<sup>4</sup>,  
Frandio Gustian<sup>5</sup>,**

<sup>1,2,3,4</sup>Dosen FEB Universitas Bandar Lampung

<sup>5</sup>Mahasiswa FEB Universitas Bandar Lampung

E-mail:

[khairudin@ubl.ac.id](mailto:khairudin@ubl.ac.id)

[aminah@ubl.ac.id](mailto:aminah@ubl.ac.id)

[luke.suciyati.amna@ubl.ac.id](mailto:luke.suciyati.amna@ubl.ac.id)

[syamsu@ubl.ac.id](mailto:syamsu@ubl.ac.id)

[frandio.17021107@student.ubl.ac.id](mailto:frandio.17021107@student.ubl.ac.id)

### **ABSTRAK**

Riset ini fokus untuk menguji pengaruh pengungkapan, SPI dan kepatuhan pada undang-undang pada kualitas LKPD untuk seluruh pemerintah kabupaten/kota yang ada di wilayah Lampung selama periode 2014-2018. Data penelitian ini bersumber dari BPK-RI wilayah Lampung dan dianalisis menggunakan regresi data panel. Hasil riset menyatakan pengungkapan memiliki pengaruh positif dan signifikan pada kualitas LKPD, sedangkan SPI dan kepatuhan pada undang-undang berpengaruh negative pada kualitas LKPD. Dengan temuan ini, maka pemerintah daerah yang melanggar UU dan peraturan terkait dengan pengelolaan keuangan dan SPI harus diberikan sanksi yang tegas, sehingga opini WTP yang diperoleh menunjukkan kualitas yang sesungguhnya yakni yang bebas dari temuan-temuan audit terkait kelemahan SPI dan ketidakpatuhan pada aturan.

**Kata Kunci:** pengungkapan, sistem pengendalian intern, kepatuhan pada undang-undang, kualitas LKPD

### **Pendahuluan**

Laporan keuangan pemerintah daerah harus disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Hal ini dilakukan agar LKPD memiliki keandalan/kualitas tinggi dan dapat dipakai untuk membantu pihak-pihak tertentu dalam mengambil keputusan, sehingga keberlangsungan entitas dapat berjalan baik. Menurut (Arens et al., 2012) opini dari auditor menjadi sinyal keandalan laporan keuangan, karena hasil audit dianggap lebih komprehensif. Demikian juga menurut (Djanegara, 2017) menyatakan bahwa opini audit merupakan pengukuran atas kualitas laporan keuangan.

Laporan keuangan yang berkualitas tinggi akan mereduksi asimetri informasi, sehingga dapat membantu pengambilan keputusan investasi menjadi lebih efisien (Setiany & Wulandari, 2015); mengurangi perilaku buruk (Biddle et al., 2009), sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi serta utilisasi sumberdaya ekonomi (Bushman & Smith, 2001; Chen et al., 2011) dan menumbuhkan kepercayaan parlemen dan *stakeholder* lainnya pada entitas.

Kualitas LKPD pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Lampung periode 2014-2018 secara rata-rata mengalami peningkatan meski pada tahun 2017 mengalami penurunan kuantitas opini WTP, namun peningkatan opini WTP tersebut menyisakan temuan audit yang jumlahnya relative cukup signifikan yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1: Perkembangan Opini WTP dan Temuan Audit Pemda di Lampung 2014-2018

No	Keterangan	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Opini WTP	8	10	13	12	13
2	Temuan Audit	371	397	320	303	313

Sumber: BPK RI, 2019

Berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Keuangan BPK RI No. 4/K/1-XIII.2/7/2014, opini audit yang diberikan oleh BPK RI sangat ditentukan oleh adanya (1) kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi; (2) kecukupan pengungkapan; (3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan (4) efektivitas SPI. Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian (Fatimah et al., 2014; Rosadi et al., 2017) yang menyatakan bahwa penerapan SPI dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan. Selanjutnya, penelitian (Gaganis & Pasiouras, 2007; Latjandu et al., 2016b) menyatakan pengungkapan berpengaruh berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan. Wati et al., (2014) menyatakan implementasi SAP berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan. Namun, hasil penelitian (Alfiani et al., 2017) menemukan SPI dan kepatuhan tidak berpengaruh signifikan terhadap opini LKPD dan penelitian (Rini & Sarah, 2015) menyatakan pengungkapan tidak memiliki hubungan signifikan dengan opini BPK-RI. Penelitian ini penting dilakukan dalam upaya meningkatkan kualitas LKPD dan juga untuk memperkuat hasil penelitian terdahulu yang masih inkonsisten.

### **Tinjauan Pustaka** **Stakeholder Theory**

Freeman (1984) menjelaskan bahwa theory stakeholder berhubungan dengan keharusan organisasi untuk peduli dengan kepentingan stakeholders ketika membuat keputusan strategis. Penyajian LKPD oleh pemerintah daerah sesuai SAP merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah untuk menjaga kepentingan para stakeholders, karena penyusunan LKPD yang sesuai dengan SAP akan melahirkan LKPD yang handal/berkualitas sehingga membantu para stakeholders membantu mengambil keputusan.

Keputusan yang diambil berdasarkan data/informasi yang berkualitas akan berdampak positif bagi keberlangsungan organisasi dan juga meminimalisasi resiko yang mungkin akan terjadi. Keberlangsungan organisasi para stakeholders tentunya akan melahirkan hubungan yang baik sebagai modal social dalam melaksanakan pembangunan, karena hubungan baik antara pemerintah daerah dan para stakeholders akan menciptakan iklim usaha, stabilitas politik dan keamanan yang kondusif yang sangat dibutuhkan oleh semua pihak.

### **Pengaruh Pengungkapan terhadap Kualitas LKPD**

Pengungkapan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan itu sendiri dan juga merupakan upaya menyampaikan informasi kepada para pengguna secara lengkap (Suwardjono, 2005). Hal ini dilakukan tidak lain dalam rangka agar para pengguna dapat memanfaatkan secara maksimal laporan keuangan sebagai referensi dalam mengambil keputusan, sehingga keputusan yang dihasilkan tidak salah dan merugikan entitas. Pengungkapan terdiri dari pengungkapan wajib dan pengungkapan sukarela. Pengungkapan wajib pada LKPD meliputi pengungkapan tentang persediaan, investasi, asset tetap, konstruksi dalam pengerjaan dan kewajiban yang tersaji pada catatan atas laporan keuangan (PP No.71 Tahun 2010). Makin tinggi tingkat pengungkapan mengindikasikan makin berkualitasnya laporan keuangan suatu entitas (Tresnawati & Nur Apandi, 2016). Hal ini karena semua informasi yang diungkapkan akan bermanfaat bagi para pengguna dan meminimalisasi resiko yang mungkin timbul, sehingga akan mengurangi asimetri informasi sebagai sumber masalah.

Hasil penelitian (Cilya et al., 2017) menjelaskan bahwa kecukupan pengungkapan berdampak positif pada opini audit di Kalimantan Timur. Priharjanto & Wardani (2016) menemukan pengungkapan berpengaruh positif pada opini audit di 33 pemerintah provinsi di Indonesia. Latjandu et al., (2016) menemukan bahwa pengungkapan berpengaruh signifikan pada kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talud. Naopal et al., (2017) menemukan bahwa pengungkapan berpengaruh pada opini audit pada pemerintah daerah di Jawa Barat. Temuan berbeda disampaikan (Lesmanawati, 2019) bahwa pengungkapan tidak berpengaruh pada opini audit pada pemerintah provinsi di Indonesia. Sehingga hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

H<sub>1</sub> : Pengungkapan berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD

### **Pengaruh Kepatuhan pada Peraturan terhadap Kualitas LKPD**

Peraturan dibuat oleh pemerintah pusat/pemerintah daerah tentunya dimaksudkan untuk meningkatkan kepatuhan pada hukum dan ketertiban umum yang tentunya akan berdampak positif pada berbagai sektor seperti: ekonomi, politik, transportasi, keuangan dan social. Pada sektor keuangan, berbagai peraturan pemerintah dibuat oleh pemerintah bersama dengan legislatif dengan tujuan agar pengelolaan keuangan berkualitas, sehingga laporan keuangan yang merupakan bentuk pertanggungjawaban eksekutif dapat dipercaya keandalannya. Namun demikian, tidak semua pihak akan mematuhi peraturan pemerintah. Ketidakpatuhan pada peraturan akan menimbulkan dampak negative, diantaranya kerugian negara (Atyanta & Rosidi, 2011) dan rendahnya kualitas laporan keuangan (Atmaja W & Probohudono, 2018).

Hasil penelitian (Rosadi et al., 2017) menyatakan kepatuhan pada peraturan berpengaruh positif pada hasil opini audit di 110 pemerintah daerah di Pulau Jawa. Maabuat et al., (2016) menemukan kepatuhan pada peraturan berpengaruh positif pada opini BPK-RI di pemerintah daerah seluruh Indonesia. Rahayu & Fidiana (2018) menemukan kepatuhan pada peraturan berpengaruh positif pada opini audit di Provinsi Jawa Timur. Temuan yang berlawanan disampaikan (Cilya et al., 2017) bahwa kepatuhan pada undang-undang berpengaruh negative pada opini audit di Kalimantan Timur.

H<sub>2</sub> : Kepatuhan pada perundang-undangan berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD

### **Pengaruh SPI terhadap Kualitas LKPD**

Pemerintah daerah merupakan organisasi yang cukup besar dan tentunya juga akan berdampak pada aktivitas yang kompleks dan frekuensi yang tinggi. Tingginya frekuensi dan kompleksnya aktivitas tentunya harus diimbangi dengan kesiapan pengamanan, sehingga aktivitas dapat berjalan dengan baik tanpa merugikan entitas/organisasi. Sistem pengendalian intern hadir sebagai kesiapan entitas untuk mengamankan organisasi dari tingginya frekuensi dan kompleksnya aktivitas. Merujuk pada PP No. 60/2008 SPI diartikan sebagai proses yang terintegrasi dan melekat sepanjang aktivitas yang dilakukan oleh semua pihak pada entitas sehingga dihasilkan keyakinan yang cukup atas tujuan organisasi. Selain itu menurut (Pane, 2018) keberadaan SPI bertujuan untuk mencegah kecurangan dan ketidakakuratan laporan keuangan.

Untuk menilai kualitas SPI pada suatu entitas/organisasi, maka diperlukan penilaian dari pihak tertentu dengan keahliannya untuk menilai apakah SPI telah berjalan sesuai ketentuan atau sebaliknya. Menurut UU No. 15/2004 pihak yang berhak menilai kualitas SPI pada organisasi pemerintah daerah adalah BPK-RI. Penilaian kualitas SPI ini dilakukan dalam rangka menentukan kualitas opini audit yang akan diberikan kepada pemerintah daerah.

Hasil penelitian (Rosadi et al., 2017) menyatakan SPI berpengaruh positif pada hasil opini audit di 110 pemerintah daerah di Pulau Jawa. Purbasari & Bawono (2017) menyatakan SPI berpengaruh positif pada opini audit di 109 pemerintah daerah di Pulau Jawa. Ramon (2014) menyatakan SPI berpengaruh positif pada opini audit di Provinsi Sumatera Barat. Namun temuan berbeda disampaikan (Cilya et al., 2017) dimana SPI tidak berpengaruh pada opini audit di Kalimantan Timur. Sehingga dirumuskan hipotesis:

H<sub>3</sub> : SPI berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD

### **Metode Penelitian**

Seluruh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Lampung menjadi sampel penelitian dengan periode pengamatan 2014-2018 dan seluruh data penelitian diperoleh dari BPK-RI Wilayah Lampung. Kualitas LKPD merupakan penyajian laporan keuangan yang memiliki kriteria sebagai berikut: kesesuaian dengan SAP, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap undang-undang, dan efektifitas sistem pengendalian intern yang diukur menggunakan opini audit (Arens et al., 2012; Djanegara, 2017).

Pengungkapan merupakan penyediaan informasi yang memadai dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan yang diukur dengan membandingkan antara pengungkapan pada LKPD dibandingkan dengan pengungkapan menurut Pedoman Standar Akuntansi Pemerintah yang berjumlah 34 item (PP No.71 Tahun 2010; Rahayuningtyas & Setyaningrum, 2018; Ruserlistyani & Heriningsih, 2013). Kepatuhan adalah suatu sikap patuh terhadap peraturan-peraturan terkait pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan daerah yang diukur menggunakan temuan audit atas ketidakpatuhan pada undang-undang (Fatimah et al., 2014). SPI merupakan proses yang terintegrasi dan melekat sepanjang aktivitas yang dilakukan oleh semua pihak pada entitas sehingga dihasilkan keyakinan yang cukup atas tujuan organisasi yang diukur dengan jumlah temuan kelemahan sistem pengendalian intern (Fatimah et al., 2014). Analisis data menggunakan uji asumsi klasik dan regresi data panel, dimana model regresi riset ini sebagai berikut:

$$KLKPD_{it} = \alpha + \beta_{1P_{it}} + \beta_{2KUU_{it}} + \beta_{3SPI_{it}} + \epsilon_{it}$$

Dimana  $KLKPD_{it}$  merupakan kualitas LKPD pada periode pengamatan;  $P_{it}$  merupakan pengungkapan pada periode pengamatan;  $KUU_{it}$  merupakan kepatuhan pada undang-undang pada periode pengamatan;  $SPI_{it}$  merupakan sistem pengendalian intern pada periode pengamatan.

## Hasil dan Diskusi

Tabel 2: Hasil Statistik Deskriptif

Keterangan	Kualitas LKPD	Pengungkapan	SPI	Kepatuhan
Mean	4,00	6,58	6,90	23,84
Maximum	5,00	14,00	22,00	32,35
Minimum	1,00	2,00	2,00	8,82
Std. Dev.	1,05	2,41	3,15	6,03

Sumber: Data Diolah, 2021

Hasil statistik deskriptif menggambarkan bahwa rata-rata kualitas LKPD berada pada opini WDP, rata-rata kualitas SPI cukup baik dengan jumlah temuan SPI yang relative sedikit yakni 6,9 kasus temuan dan kualitas kepatuhan pada peraturan pemerintah daerah yang relative cukup dengan jumlah temuan ketidakpatuhan sebesar 23,84 temuan kasus. Sedangkan tingkat pengungkapan masih rendah hanya 6,5 item dari 34 item yang diwajibkan. Kondisi ini menjadikan pemerintah daerah di Provinsi Lampung untuk terus meningkatkan kualitas pengungkapan, sistem pengendalian intern dan juga kepatuhan pada undang-undang sehingga akan meningkatkan kualitas LKPD.

Riset ini telah melakukan uji asumsi klasik dan uji pemilihan model dengan hasil yang baik dan menghasilkan *fixed effect model* sebagai model regresi yang paling tepat seperti pada tabel 3:

Tabel 3: Model Regresi dengan *fixed effect model*

Variabel	Coefficient	t-Statistic	Prob
C	0.825229	1.095437	0.2779
P	0.172016	6.449246	0.0000
KUU	-0.035606	-1.587036	0.1180
SPI	-0.052738	-1.509267	0.1368
Adj R-squared		0.745693	
Prob F-statistic		0.000000	

Sumber: Data Diolah, 2021

Berdasarkan *fixed effect model*, model penelitian ini dinyatakan layak, karena nilai prob F-statistik sebesar 0.000000 atau ( $0.000000 < 0.05$ ) sehingga perubahan variabel kualitas LKPD dapat dijelaskan oleh variabel pengungkapan, SPI dan kepatuhan pada undang-undang. Nilai prob SPI dan kepatuhan pada undang-undang  $> 0.05$  sehingga hipotesis 3 dan hipotesis 2 tidak terdukung, sedangkan hipotesis 1 terdukung karena nilai prob pengungkapan  $< 0.05$  nilai adjusted R-squared sebesar 0.745 menunjukkan bahwa variabel pengungkapan, SPI dan kepatuhan pada undang-undang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi kualitas LKPD sebesar 74,5% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lainnya seperti: karakteristik pemerintah daerah, sistem informasi akuntansi, dan lainnya.

### **Pengungkapan Berpengaruh Positif pada Kualitas LKPD**

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pengungkapan berpengaruh positif pada kualitas LKPD, ini berarti peningkatan item pengungkapan pada LKPD di Indonesia akan berdampak pada peningkatan kualitas LKPD. Temuan ini mendukung penelitian (Cilya et al., 2017; Latjandu et al., 2016; Naopal et al., 2017; Priharjanto & Wardani, 2016; Tresnawati & Nur Apandi, 2016) yang menyatakan bahwa kecukupan pengungkapan pada laporan keuangan berdampak positif pada opini audit dan bertentangan dengan penelitian (Lesmanawati, 2019) yang menyatakan bahwa pengungkapan tidak berpengaruh pada opini audit.

Salah satu kriteria pemberian opini audit oleh BPK-RI adalah kecukupan pengungkapan. Makin lengkap pengungkapan yang disampaikan oleh pemerintah daerah menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk transparan dan membantu para pengguna laporan keuangan dalam proses pengambilan keputusan dan hal ini akan memungkinkan BPK-RI memberikan opini yang terbaik karena pemerintah daerah telah menyampaikan informasi-informasi penting yang diwajibkan dan dibutuhkan oleh para pengguna LK. Diharapkan dengan kecukupan pengungkapan ini dapat meminimalisasi resiko yang mungkin timbul dari sebuah keputusan.

### **SPI Berpengaruh Negatif pada Kualitas LKPD**

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa SPI berpengaruh negative pada kualitas LKPD, ini berarti peningkatan kualitas SPI pada pemerintah daerah di Indonesia tidak berdampak pada peningkatan kualitas LKPD. Temuan ini mendukung penelitian (Cilya et al., 2017) yang menyatakan bahwa SPI tidak berpengaruh pada opini audit dan tidak mendukung penelitian (Purbasari & Bawono, 2017; Ramon, 2014; Rosadi et al., 2017) yang menyatakan SPI berpengaruh positif pada hasil opini audit.

SPI dirancang untuk memberikan keyakinan atas laporan keuangan, efisiensi dan kepatuhan pada aturan. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan kerjasama semua pihak, ini penting karena implementasi SPI tidak dapat berjalan maksimal jika tidak didukung semua pihak. SPI yang berkualitas bisa saja tidak berjalan karena ada beberapa pihak yang memiliki kepentingan pribadi/kelompok, sehingga keberadaan SPI pada pemerintah daerah tidak dapat memberikan dampak pada kualitas LKPD.

### **Kepatuhan pada undang-undang Berpengaruh negative pada Kualitas LKPD**

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa SPI berpengaruh negative pada kualitas LKPD, ini berarti peningkatan kualitas SPI pada pemerintah daerah di Indonesia tidak berdampak pada peningkatan kualitas LKPD. Temuan ini mendukung penelitian (Cilya et al., 2017) yang menyatakan bahwa kepatuhan pada undang-undang berpengaruh negative pada opini audit dan tidak mendukung penelitian (Maabuat et al., 2016; Rahayu & Fidiana, 2018; Rosadi et al., 2017) yang menyatakan kepatuhan pada peraturan berpengaruh positif pada hasil opini audit.

Seyogyanya undang-undang dan peraturan dibuat oleh pemerintah pusat/pemerintah daerah untuk menjaga ketertiban, begitupun undang-undang dan peraturan tentang pengelolaan keuangan negara dibuat agar pengelolaan keuangan pemerintah menjadi tertib sehingga laporan keuangan yang disusun dan dilaporkan sesuai SAP dan tentunya berkualitas. Namun dalam prakteknya undang-undang dan peraturan yang dibuat tersebut dilanggar dengan sengaja oleh oknum tertentu dengan tujuan tertentu yang tidak dibenarkan dan pelanggaran ini tidak diproses dan juga tidak diberikan sanksi yang tegas, sehingga kepatuhan pada undang-undang dan peraturan khususnya tentang pengelolaan keuangan tidak membawa dampak positif pada kualitas LKPD.

### **Kesimpulan**

Temuan riset ini adalah pengungkapan memiliki pengaruh positif dan signifikan pada kualitas LKPD, sedangkan SPI dan kepatuhan pada undang-undang berpengaruh negative pada kualitas LKPD. Implikasi dari hasil riset ini berupa sanksi hukum yang tegas kepada pemerintah daerah yang melanggar undang-undang dan peraturan terkait dengan pengelolaan keuangan dan SPI, sehingga opini WTP yang diperoleh menunjukkan kualitas yang sesungguhnya yakni yang bebas dari temuan-temuan audit terkait kelemahan SPI dan ketidakpatuhan pada aturan. Riset ini masih terbatas pada pemerintah daerah yang ada di Provinsi Lampung, sehingga riset ini dapat dikembangkan pada seluruh pemerintah daerah di Indonesia agar menghasilkan temuan yang lebih berkualitas karena didukung oleh data yang lebih meyakinkan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Alfiani, A. N., Rahayu, S., & Nurbaiti, A. (2017). Jumlah temuan audit atas sistem pengendalian intern dan jumlah temuan audit atas kepatuhan terhadap opini laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 9(1), 12. <https://doi.org/10.23969/jrak.v9i1.362>
- Arens, A. A., Elder, R. J., & Beasley, M. S. (2012). *Auditing and Assurance Services An Integrated Approach*. Pearson Education Inc. <https://onesearch.id/Record/IOS5906.ai:slims-5249>
- Atmaja W, R. S. A., & Probohudono, A. N. (2018). Analisis audit BPK RI terkait kelemahan SPI, temuan ketidakpatuhan dan kerugian negara. *INTEGRITAS*, 1(1), 81–110. <https://doi.org/10.32697/integritas.v1i1.115>
- Atyanta, R., & Rosidi. (2011). Analisis opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah (Studi kasus pada kabupaten X di Jawa Timur). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 1(1). <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/310>
- Biddle, G. C., Hilary, G., & Verdi, R. S. (2009). How does financial reporting quality relate to investment efficiency? *Journal of Accounting and Economics*, 48(2–3), 112–131. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2009.09.001>
- Bushman, R. M., & Smith, A. J. (2001). Financial accounting information and corporate governance. *Journal of Accounting and Economics*, 32(1–3), 237–333. [https://doi.org/10.1016/S0165-4101\(01\)00027-1](https://doi.org/10.1016/S0165-4101(01)00027-1)
- Chen, F., Hope, O.-K., Li, Q., & Wang, X. (2011). Financial reporting quality and investment efficiency of private firms in emerging markets. *The Accounting Review*, 86(4), 1255–1288. <https://doi.org/10.2308/accr-10040>
- Cilya, D. D., Rantelangi, C., & Kusumawardani, A. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern (SPI) kepatuhan pada peraturan perundang-undangan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan kecukupan pengungkapan terhadap opini audit atas laporan keuangan. *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman*, 2(3). <https://doi.org/10.29264/jiam.v2i3.1213>
- Djanegara, M. S. (2017). Pengaruh kualitas audit terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi*, 21(3), 461–483. <https://ecojoin.org/index.php/EJA/article/view/252/241>
- Fatimah, D., Sari, R. N., & Rasuli, M. (2014). Pengaruh sistem pengendalian intern, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, opini audit tahun sebelumnya dan umur pemerintah daerah terhadap penerimaan opini wajar tanpa pengecualian pada laporan keuangan pemerintah daerah di seluruh Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 3(1), 1–15. <https://ja.ejournal.unri.ac.id/index.php/JA/article/viewFile/2531/2487>

- Freeman, R. E. (1984). *Strategic management: A stakeholder approach*. Cambridge University Press. <https://www.cambridge.org/id/academic/subjects/management/business-ethics/strategic-management-stakeholder-approach>
- Gaganis, C., & Pasiouras, F. (2007). A multivariate analysis of the determinants of auditors' opinions on Asian banks. *Managerial Auditing Journal*, 22(3), 268–287. <https://doi.org/10.1108/02686900710733143>
- Latjandu, I., Kalangi, L., & Tinangon, J. J. (2016). Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Kepulauan Talaud. *ACCOUNTABILITY*, 5(2), 98. <https://doi.org/10.32400/ja.14428.5.2.2016.98-109>
- Lesmanawati, D. (2019). Pengaruh local government wealth, intergovernmental revenue dan opini audit terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi di Indonesia secara online. *InFestasi*, 15(2), 109–116. <https://doi.org/10.21107/infestasi.v15i2.6005>
- Maabuat, J. S., Morasa, J., & Saerang, D. P. E. (2016). Pengaruh kelemahan sistem pengendalian internal, ketidakpatuhan pada peraturan perundang-undangan dan penyelesaian kerugian negara terhadap opini BPK-RI atas laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia. *ACCOUNTABILITY*, 5(2), 52–62. <https://doi.org/10.32400/ja.14424.5.2.2016.52-62>
- Naopal, F., Rahayu, S., & Yudowati, S. P. (2017). Pengaruh karaktersitik daerah, jumlah penduduk, temuan audit, dan opini audit terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. *Assets: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 7(1), 56–68. <https://doi.org/10.24252/v7i1.3933>
- Pane, A. A. (2018). Pengaruh penerapan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap perilaku kecurangan. *JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 4(2), 40–48. <https://doi.org/10.31289/jab.v4i2.1812>
- PP No.71 Tahun 2010. *Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Priharjanto, A., & Wardani, Y. Y. (2016). Pengaruh temuan, tingkat penyimpangan, opini audit, dan karakteristik pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi di Indonesia. *Info Arta*, 1, 97–110. <https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JIA>
- Purbasari, H., & Bawono, A. D. B. (2017). Pengaruh desentralisasi fiskal, sistem pengendalian internal dan kinerja pemerintah daerah terhadap akuntabilitas laporan keuangan. *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 2(2), 102–108. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v2i2.4884>
- Rahayu, F. I. S., & Fidiana, F. (2018). Derterminan kualitas opini audit pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(2), 267–279. <https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9016>

- Rahayuningtyas, D. P. A., & Setyaningrum, D. (2018). Pengaruh tata kelola dan e-government terhadap korupsi. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 1(4). <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2017.v1.i4.2597>
- Ramon, D. (2014). Pengaruh sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas keuangan (studi empiris pada inspektorat kota se provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Akuntansi*, 2(2). <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/1049>
- Rini, R., & Sarah, A. (2015). Opini audit dan pengungkapan atas laporan keuangan pemerintah kabupaten serta kaitannya dengan korupsi di Indonesia. *ETIKONOMI*, 13(1). <https://doi.org/10.15408/etk.v13i1.1875>
- Rosadi, S., Siyamto, Y., & Aisyiah, H. N. (2017). Pengaruh ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan, kelemahan sistem pengendalian internal, kepatuhan peraturan perundang-undangan, status daerah dan ukuran daerah terhadap opini laporan keuangan pemerintah daerah di pulau Jawa tahun 2013. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3(02), 99–111. <https://doi.org/10.29040/jiei.v3i02.103>
- Rusherlistyani, R., & Heriningsih, S. (2013). Faktor- faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pekalongan*, 13(2), 5157.
- Setiany, E., & Wulandari, A. (2015). Kualitas pelaporan keuangan dan asimetri informasi di industri manufaktur Indonesia. *EFEKTIF Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*, 6(2), 17–24. [https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/50140157/erna\\_dan\\_wulandari\\_2015](https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/50140157/erna_dan_wulandari_2015)
- Suwardjono. (2005). *Teori akuntansi: Perekayasaan pelaporan keuangan*. BPFE Yogyakarta. <https://suwardjono.staff.ugm.ac.id/buku/teori-akuntansi.html>
- Tresnawati, F., & Nur Apandi, R. N. (2016). Pengaruh tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap kualitas laporan keuangan dengan tingkat pengungkapan laporan keuangan sebagai variabel moderating (Studi empiris pada kementerian/lembaga Republik Indonesia). *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 8(1), 1. <https://doi.org/10.17509/jaset.v8i1.4017>
- Wati, K. D., Herawati, N. T., & Sinarwati, N. K. (2014). Pengaruh kompetensi SDM, penerapan SAP, dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Undiksha*, 2(1). <https://doi.org/10.23887/jimat.v2i1.2972>